



Funded by the
European Union



International
Labour
Organization



United Nations
Office on Drugs and Crime



Memastikan Kerja Layak dan Mengurangi Kerentanan bagi Perempuan dan Anak dalam Konteks Migrasi Tenaga Kerja di Asia Tenggara (PROTECT Indonesia)

© ILO

► Sekilas



Mitra

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2PMI)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
- Federasi Serikat Buruh Migran dan Informal, afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SEBUMI KSBSI)
- Koalisi Perempuan Indonesia
- Solidaritas Perempuan
- Women Crisis Center Mawar Balqis
- Jaringan Buruh Migran (JBM)
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)



Jangka waktu

Januari 2024 – Desember 2026



Target penerima manfaat

Perempuan pekerja migran, anak, dan kelompok berisiko dalam konteks perdagangan dan penyelundupan manusia.



Fokus geografi

- Regional, nasional dan sub-nasional (Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Sumatra Utara) dengan fokus pada migrasi ke Malaysia.



Tujuan

- Meningkatkan hukum dan kebijakan yang melindungi pekerja migran, anak-anak dan kelompok rentan lainnya;
- Meningkatkan mekanisme pencegahan dan perlindungan di tingkat nasional dan regional; dan
- Meningkatkan akses terhadap informasi, layanan sosial dan hukum, konseling dan asosiasi untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi.

► Konteks dan latar belakang

Indonesia masih menjadi negara asal utama para pekerja migran. Setengah dari jumlah penempatan formal adalah perempuan, dengan proporsi signifikan ke Malaysia, Singapura, Hongkong dan Taiwan sebagai pekerja rumah tangga dan perawat.

Memastikan perekrutan yang adil masih tetap menjadi tantangan. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan aturan yang melarang pembebanan biaya kepada pekerja migran Indonesia dan berupaya menuju implementasi yang lebih kuat, perempuan masih menghadapi oknum calo dan broker yang tidak bertanggung jawab, informasi yang tidak berimbang, penipuan lowongan kerja serta biaya perekrutan maupun biaya lain yang menjerumuskan mereka dalam jeratan utang.



Indonesia telah mengeluarkan aturan yang melarang pembebanan biaya kepada pekerja migran Indonesia dan berupaya menuju implementasi yang lebih kuat, perempuan masih menghadapi oknum calo dan broker yang tidak bertanggung jawab, informasi yang tidak berimbang, penipuan lowongan kerja serta biaya perekrutan maupun biaya lain yang menjerumuskan mereka dalam lilitan utang.

Respons dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum juga berkejaran dengan pola-pola eksploitasi baru. Penipuan dan perdagangan manusia yang dimungkinkan dengan cara-cara melalui dunia maya di seluruh kawasan menjebak para pekerja migran Indonesia, sementara garda terdepan perlindungan membutuhkan dukungan dalam menerapkan pendekatan berbasis penyintas dan penanganan kasus lintas batas negara. Investasi berkelanjutan dalam identifikasi korban, kerja sama bilateral dan jalur penanganan aduan yang aman tetap menjadi hal penting bagi para pekerja migran perempuan dalam mendapatkan pemulihan.

Dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa, Proyek PROTECT bekerja di Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk menjaga hak para pekerja migran perempuan dan anak-anak dengan menitikberatkan pada migrasi perempuan Indonesia ke Malaysia.

Meningkatkan hukum dan kebijakan

Melalui kerja sama dengan Kemnaker, BP2PMI/KP2PMI, JBM dan Apindo, Proyek PROTECT telah membantu menerapkan prinsip-prinsip responsif gender dan perekrutan yang adil ke dalam kebijakan dan praktik nasional. Tiga alat kebijakan utama dikembangkan:



@ILO

- Daftar Periksa Uji Tuntas Perekrutan yang Adil untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mendorong terwujudnya praktik perekrutan yang adil dan transparan;
- Panduan dan Daftar Periksa untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia; dan
- Pedoman Pelaksanaan Orientasi/Edukasi Pra Pendaftaran memastikan pekerja migran menerima informasi resmi, tepat dan akurat dalam pembuatan keputusan dan persiapan untuk bekerja ke luar negeri.

Langkah-langkah ini memperkuat pengawasan, transparansi dan perlindungan pekerja di seluruh tahapan migrasi, yaitu: sebelum, selama dan sesudah bekerja.

Antara Maret dan Juni 2025, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara formal mengundang ILO untuk memaparkan standar ketenagakerjaan internasional dalam sidang dengar pendapat mengenai amendemen UU No. 18/2017 mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Evaluasi partisipatif tripartit yang melibatkan 104 peserta (setengah di antaranya adalah perempuan) menghasilkan rekomendasi yang jelas, yang kini telah diserahkan ke DPR untuk memastikan inklusivitas dan keselarasan dengan standar global.

@ILO





Melalui kemitraan multi pemangku kepentingan, Proyek PROTECT menyelenggarakan lokakarya nasional mengenai pengawasan ketenagakerjaan yang responsif gender, dengan mengundang 170 peserta untuk menguatkan sistem pengawasan untuk pekerja migran.

Selanjutnya, dengan mendukung Biro Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Laporan Indikator Biaya Perekrutan (SDG 10.7.1) pada Hari Migran Internasional 2024, Proyek PROTECT membantu memastikan masa depan kebijakan migrasi yang dipandu oleh data dan bukti yang dapat diandalkan.

Memperkuat sistem dan kelembagaan

Untuk mewujudkan praktik migrasi yang adil dan aman, Proyek PROTECT telah mengembangkan kapasitas ratusan pejabat pemerintah, P3MI, lembaga pelatihan swasta, serikat pekerja dan LSM.

Pada 2024, 542 orang petugas pengantar kerja (57% diantaranya perempuan) dari Kemnaker dan KP2MI/BP2MI menerima pelatihan dalam memberikan layanan bagi pekerja migran yang akan diberangkatkan—memberikan informasi dan panduan terverifikasi bagi pencari kerja melalui serial webinar nasional.

Bersama dengan KP2MI/BP2MI dan Internasional Organization for Migration (IOM), Proyek PROTECT membantu KP2MI/BP2MI melembagakan standar perekrutan adil melalui pengembangan sistem akreditasi/peringkat berbasis situs daring untuk P3MI. Instrumen dan panduan sistem itu diuji melalui konsultasi nasional dengan 98 perwakilan tripartit dan pelatihan bagi 112 petugas verifikasi (setengah di antaranya adalah perempuan) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap badan-badan perekrutan.

Pelatihan pelengkap mengenai perencanaan kepatuhan strategis untuk 60 orang pengawas dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) telah memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan perekrutan oleh lembaga perekrutan di tingkat nasional. Lebih dari 300 P3MI yang telah menandatangani 'Pakta Integritas' berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perekrutan yang adil.

Kapasitas penegakan hukum juga telah mengalami perbaikan: kepolisian, petugas imigrasi dan jaksa penuntut umum menerima pelatihan mengenai investigasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan analisis bukti digital. Dengan dukungan dari Badan PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC), 28 petugas dari Direktorat TPPO dan Kejahatan Siber Polri menerima pelatihan intensif mengenai keamanan siber, intelejen sumber terbuka (OSINT), *cryptocurrencies* dan penyelidikan jaringan gelap (*darknet*). Pelatihan ini memperkuat kemampuan mereka dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mendisrupsi TPPO dan jejaring penyeludupan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan maya. UNODC juga memberikan bantuan teknis untuk badan imigrasi dan penegakan hukum lain dalam mencegah



Proyek PROTECT membantu melembagakan standar perekrutan adil melalui pembangunan sistem akreditasi atau rating berbasis web untuk P3MI.

dan merespons TPPO dan penyelundupan migran (PM), seraya meningkatkan kerja sama antar lembaga.

Pada bulan Oktober dan November 2025, UNODC mengadakan lokakarya untuk Merespons Penyelundupan Migran melalui Laut dan Forum Pemuda Nasional di November 2025 untuk meningkatkan pemahaman kaum muda dan calon migran mengenai risiko TPPO dan eksploitasi daring.

Memperluas akses untuk layanan dan dukungan

Untuk memastikan perlindungan menjangkau mereka yang paling membutuhkan, Proyek PROTECT mendirikan Migrant Worker Resource Center (MRC) di Cirebon, Lampung Timur, Kupang, Tulungagung dan Deli Serdang. Dijalankan oleh federasi serikat pekerja dan organisasi perempuan, pusat informasi ini memberikan layanan konseling, penanganan kasus dan mekanisme koordinasi dan rujukan dengan otoritas setempat bagi calon pekerja migran dan pekerja migran yang pulang.

Di tingkat komunitas, Proyek PROTECT membantu 45 desa mengintegrasikan layanan migrasi aman ke dalam tata kelola lokal, melatih pejabat desa setempat dalam mencegah TPPO, kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja perempuan dan keluarga mereka.



Pada bulan September 2025, Proyek PROTECT bersama-sama dengan BP2MI, Dinas Ketenagakerjaan Cirebon dan Saver Global merintis keamanan siber finansial dan pelatihan keamanan digital bagi 140 peserta di dua lokasi di Cirebon. Pelatihan diampu oleh para pejabat dinas dan mitra MRC, pelatihan ini melengkapi peserta dengan alat praktis dalam melindungi diri dari penipuan dan eksploitasi daring.

► Informasi narahubung:

► ILO:

Sophia Kagan, Kepala Penasihat Teknis, Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik; kagan@ilo.org

Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program Indonesia, ILO Indonesia and Timor Leste; sinthia@ilo.org

► UNODC:

Raden Andrean Sangabie Sancaya, Koordinator Program Indonesia, Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran, Kantor UNODC Indonesia; raden.sancaya@un.org

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak pada Migrasi Kerja (PROTECT INDONESIA)



© International Labour Organization 2025

► Kontak:

International Labour Organization
Kantor ILO di Indonesia dan Timor-Leste
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
Indonesia
T: +62 (21) 391 3112
E: jakarta@ilo.org

ILO.ORG
 IndonesiaILO
 @indonesiaILO
 ILO TV Indonesia
 ilo.indonesia
 @iloinfo



Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs laman Proyek PROTECT.